



CBA Sebut Manajemen Aset Pemprov Kalbar Amburadul

Mobil dan Motor Dinas Kocar-kacir

Wagub: Kalau Temuan BPK, Kita Tindaklanjuti

PONTIANAK-RK. Koar-koar wacana pembentukan Pansus dari beberapa anggota DPRD — untuk membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal tata aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat— belum terwujud, sudah muncul problem lain. Konon, Pemprov Kalbar melakukan pembiaran atas kendaraan dinas yang dipinjamkan kepada sejumlah aparat sipil negara (ASN)/pegawai negeri sipil (PNS).

Dari data yang dihimpun Centre for Budget Analysis (CBA), ada kendaraan dinas yang masih dalam penguasaan penstunan ASN dan ada juga yang keberadaannya misterius. Kocar-kacir.

“Pada tahun anggaran 2013, atau bisa dilihat dari hasil audit BPK semester II tahun 2014, ditemukan kerugian Negara sebesar Rp3.280.593.300 akibat jelek dan amburadulnya manajemen aset Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

■ Halaman 7



DIRANTAI. Sejumlah motor dinas yang dirantai di area parkir Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (3/8).

BELANTAN-RK

ASET ATAU KENDARAAN DINAS YANG DIKUASAI OLEH PENSIUNAN PNS

No	Jenis kendaraan	No. Polisi	Tahun peroleh	Nilai	Pemegang
A					
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura					
1	Kijang	KB 1005 AR	1995	49.000.000	ARV, S.P
2	Kijang	KB 1284 AF	1991	16.000.000	Jr. I
3	Katana	KB631A	1990	13.100.000	Ir. Uray R
4	Avanza	KB 1424 AN	2004	110.000.000	Ir. TT
B					
Dinas Kehutanan					
1	Daihatsu Hilink	KB 1204 AP	1988	47.350.000	Ir. MSA, M.M.
2	Toyota Kijang	KB 8091 WL	2000	129.625.000	HMSS, S.P., S.E., M.M.

■ Halaman 7



Mobil dan Motor Dinas Kocar-kacir

C	Biro Umum Sekretariat Daerah				
1	Toyota Kijang Super	KB 1092 AA	1990	80,250,000	Alm. FX Har
2	Sedan Ford Telstar	KB 206 AH	1992	75,000,000	IS
3	Toyota Kijang LSX	KB 1093 AU	2002	80,250,000	K
4	Toyota Kijang LSX	KB 1165 AU	2002	80,250,000	S
5	Toyota Inova	KB1531AV	2006	199,000,000	Kz
6	Toyota KijangKrisla	KB 1004 AV	2003	113,000,000	BIN
D	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1	Mitsubishi Kuda	KB 1185 AT	2001	125,000,000	B
2	Toyota Rush 1,5 GF	KB 1813 HG	2009	185,333,350	M
E	BPKAD				
1	Kijang Kapsul	KB 1112 AW	2004	161,500,000	PA
2	Jupiter Z	KB 2447 WT	2006	11,981,300	Ros
3	Suzuki	KB 3143 AV	1999	7,000,000	Alm. Fi
4	Honda Win	KB 2220	2001	10,000,000	Sy. YA
5	Yamaha 5 LM	KB 5784 AR	2002	12,370,000	AH
6	Yamaha 5 LM	KB 5786 AR	2002	12,370,000	Uray EG
7	Yamaha RX-King 135	KB.3005 HP	2003	14,900,000	Preses TP-TGR (hilang)
8	Yamaha RX-King 135	KB 2984 HP	2003	14,900,000	Rh
9	Yamaha Jupiter	KB 3283 WA	2004	12,450,000	Sup
10	Yamaha Jupiter	KB 4077 AE	2004	12,370,000	US
11	Honda Super X	KB 4224 WI	2005	11,880,000	RI
12	Yamaha Jupiter Z	KB 2434 WT	2006	11,980,300	Muh
13	Honda	KB 3134 AU	2008	14,380,000	Ibu I
				1,611,099,950	

Manajemen aset yang jelek dan amburadul itu dijadikan modus untuk "mengambil" aset yang diduga bagi kepentingan pribadi," ungkap Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dalam surat elektroniknya kepada sejumlah media, belum lama ini.

Menurut dia, pihak Pemrov Kalbar seperti melakukan pembiaran terhadap kendaraan dinas yang dikendarai sejumlah pensiunan ASN sehingga ada potensi kerugian Negara sebesar Rp1.611.099.950. "Kendaraan ini pada mulanya milik Pemrov Kalbar yang dipinjam pakai oleh pegawai di lingkungan Pemprov. Namun diketahui bahwa masih terdapat kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang dikuasai oleh para pensiunan PNS dan belum dikembalikan kepada pemerintah," papar Uchok.

Kemudian, ada juga kendaraan dinas roda dua dan roda empat senilai Rp1.669.493.350,00 yang tidak diketahui keberadaannya. "Tidak diketahui keberadaan ini bisa diartikan bahwa kendaraan itu mungkin sudah dijual, mungkin kendaraan tersebut sudah balik nama alias bukan milik Pemda lagi. Dan, mungkin juga, kendaraan disembunyikan agar publik tidak tahu," ujar Uchok berspekulasi.

Bila aset-aset itu belum dikembalikan ke Negara, ia melanjutkan, maka Pemrov Kalbar telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Dari kasus-kasus tersebut, CBA (Centre For Budget Analysis) meminta aparat hukum memanggil pihak Pemda Kalbar untuk dimintai keterangan atas banyak aset yang entah kemana maupun yang masih di tangan pensiunan PNS. Karena ini ada potensi kerugian Negara sebesar Rp3,2milyar," tutur Uchok.

Ia menambahkan, amburadulnya pengelolaan aset ini memperlihatkan bahwa pihak Pemda Kalbar tidak serius menjaga kekayaan/aset daerah. Dampaknya, bukan hanya pemerintah saja yang dirugi-

kan. "Rakyat juga, disuruh bayar pajak tapi aset (pemerintah) tidak dikelola dengan baik. Malahan aset dimiliki oleh orang lain yang digaji dengan duit rakyat itu," tutup Uchok.

Terkait ini, anggota Komisi I DPRD Kalbar, Maryono mendesak Pemprov Kalbar cepat menindaklanjuti. Para ASN pemakai kendaraan tersebut pun semestinya sadar untuk mengembalikan.

"Harapan kita, pemerintah daerah segera mungkin menarik kendaraan dinas tersebut, jangan terlalu lama dibiarkan kalau memang itu aset pemerintah provinsi," tegasnya.

Termasuk, kendaraan dinas yang jadi 'siluman' alias tak diketahui keberadaannya. "Kita minta pemerintah apabila memang benar ada kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya maka harus diproses. Ini menjadi tanggungjawab provinsi, segera mungkin aset didata kembali," pinta Maryono.

Pemprov Seharusnya Tegas
Senada, pakar kebijakan publik dari Universitas Tanjungpura, Syarif Usmulyadi mengancam pensiunan pejabat pemerintah maupun wakil rakyat yang sudah selesai bertugas namun masih tetap menggunakan fasilitas negara seperti rumah dan kendaraan dinas. Sebab, sejatinya, fasilitas-fasilitas dinas yang melekat pada mereka diberikan hanya untuk mendukung atau meniadahkan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Bilamana pejabat pemerintah sudah dinyatakan berhenti dari jabatannya akibat pensiun maupun Dewan yang sudah tidak lagi memiliki keanggotaan di DPR, maka segala hal yang berkaitan dengan fasilitas rakyat, fasilitas negara, publik, dengan sendirinya harus dikembalikan ke pemerintah," tegas Usmulyadi kepada Rakyat Kalbar, Senin (3/8).

Imbuh dia, "Tapi kan begini, rata-rata pejabat kita ini kan budaya malunya itu dah tipis. Seolah-olah, dengan pengabdianya selama ini, dia masih bisa mengklaim bahwa boleh memakai (aset negara, red). Itu tidak benar, ada tata kelola, ada keten-

tuhan, yang mengatur tentang itu."

Aturannya, fasilitas publik itu harus dikembalikan pada saat jabatan berakhir, tidak mengenal masa transisi. "Sebelum berakhir masa jabatan, harusnya mereka sudah siap-siap. Pada saat berakhir sudah langsung dikembalikan. Idealnya begitu dan begitu lah ketentuannya," tutur Usmulyadi.

Hanya saja, ia melanjutkan, bisa jadi masih ada rasa tak enak hati dari instansi terkait untuk menarik kendaraan-kendaraan dinas tersebut. Artinya, kata Usmulyadi, mungkin karena ada kedekatan atau pejabat yang pensiun lebih senior, dan lain-lain.

"Tidak boleh begitu. Itu kan alasan-alasan subjektif. Aturan harus ditegakkan, tinggal komitmen para pejabat yang memerintah untuk melaksanakan itu. Kalau tidak dikembalikan, ya surati. Kalau masih juga tidak dikembalikan, ambil secara paksa. Itu bukan punya pribadi, itu punya publik," paparnya.

Soal sejumlah kendaraan dinas yang belum jelas keberadaannya, Usmulyadi menyarankan agar pemerintah menemph jalur hukum. "Apalagi sampai dijual atau digadai, pemerintah harus memproses hukum, adukan ke polisi. Jangan biarkan berlarut-larut," pintanya, seraya menambahkan budaya malu perlu dihidupkan kembali.

Menjawab kritik, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menyatakan, temuan BPK mengenai kendaraan dinas yang tak terinventarisir dengan baik tersebut akan diperiksa kembali oleh pihaknya. "Kalau ada temuan BPK, pasti kita tindaklanjuti dan lakukan pengecekan," ungkap Christiandy, ditemui Rakyat Kalbar, di rumah jabatannya, Senin (3/8).

"Ditegaskannya, untuk memiliki aset berupa kendaraan dinas, ada mekanisme tersendiri. Kalau mau didum, harus melalui proses. Kalau tidak, dia harus mengembalikan," ujar Christiandy.

Laporan: Achmad Mundzirin, Oesya Ade CB dan Isfiansyah
Editor: Mohamad Iqbal